

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hamzah, A. (2004). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hakim, L. (2020). Asas-asas hukum pidana. Deepublish. Yogyakarta.
- Ibrahim, J. (2008). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayu Media Publishing. Malang.
- Irwansyah. (2021), *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Muhjad, H. (2015). Hukum lingkungan sebuah pengantar untuk konteks Indonesia. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum: Edisi revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nur Solikin, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum Lingkungan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Reza, A., A., (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta.
- Suyanto. (2018). Pengantar hukum pidana. Deepublish, Yogyakarta.
- Zainuddin. Ali. (2009). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6842)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52).

C. JURNAL

Amin, I. (2018). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal IUS, VI(2) : 1-20.
DOI : <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.558>

Assaori, M. S., et al. (2025). Kegagalan sanksi pidana dalam penegakan hukum tindak pidana kejahatan lingkungan (Environmental Crime) di Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 6(2) : 419-430.
DOI : <https://doi.org/10.47679/ib.20251088>

Burhan, S., Mina, R., & Fality, F. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Yustisiabel, 2(2) : 169-188.
DOI : <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v2i2.229>

Febryani, E., et al. (2024). *Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Dampak Penuntutan Terhadap Korporasi Akibat Pailit*. Collegium Studiosum Journal. 7(1). : 1-10.
DOI : <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1173>

Fitriani, H. Y., & Kharisma, D. B. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT*.

- Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo*). Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 8(2) : 64-73.
DOI : <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49757>
- Hakim, E. R. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia dalam Aspek Keadilan*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. 2(2) : 197-203.
DOI : <https://doi.org/10.20961/jr&d.v12i1.84115>
- Indah, S. (2019). *Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1): 64-80.
DOI : <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.404>
- Kurniawan, R., & Sari, S. N. I. D. (n.d.). Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas strict liability (studi pembaharuan hukum pidana lingkungan hidup). *Jurnal Yuridis*, 1(2) : 153-168.
DOI : <https://doi.org/10.35586/v1i2.148>
- Makhron, F. M., et al. (2025). Penerapan teori strict liability dalam tindak pidana pencemaran lingkungan dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 6(1), 441-454.
DOI : <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6290>
- Meliwati, I., & Priyana, P. (2021). Tindak pidana lingkungan terhadap dumping limbah bahan berbahaya beracun (B3) tanpa izin. *Jurnal Education and Development*, 9(2) : 88 – 95.
DOI : <https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2476>
- Mutiara, A. (2022). *Upaya Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sudut Pandang Green Victimology*. Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, 2(1) : 129-146.
DOI : <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1093>
- Muttaqin, A., Herysta, E. A., Faisal, & Sadewa, P. P. (2023). *Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis*. University of Bengkulu Law Journal, 8(1) : 35-51.
DOI : <https://doi.org/10.33369/ubelaj.8.1.35-51>
- Muttaqin, A. (2024). *A Review Of The Principle Geen Straf Zonder Schuld In Criminal Liability For Fraud Through Mystical Ritual Modus*. Jurnal Peradaban Hukum Magister Hukum. 2(2) : 58-61.
DOI : <https://doi.org/10.33019/jph.v2i2.6>

- Nugraha, A. A., et al. (2021). *Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Tora, 7(2) : 283-298.
DOI : <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>
- Pawewang, R. R., Pangkerego, O. A., & Manopo, B. (2021). *Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP*. Lex Privatum, 4(9) : 233-242.
- Prasetyo, E., A., et al. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia*. Collegium Studiosum Journal. 7(1) : 373-385.
DOI : <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1491>
- Suslianto, I. H. (2022). *Penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan*. At-Tanwir Law Review, 2(2): 162-172.
DOI : <https://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2028>
- Syarial, et al. (2025). *Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anggota TNI Dihubungkan dengan Pasal 103 KUHP*. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial. 3(2) : 105-114.
DOI : <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2>
- Rachmat, N. A. (2022). *Hukum pidana lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(2), 188-207.
DOI : <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>
- Ridlo, A. A., & Arsali, I. (2024). *Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup*. Journal Presumption of Law, 6(2) : 140-157.
DOI : <https://doi.org/10.31949/jpl.v6i2.8788>
- Suryawan, I. G. B., et al. (2025). *Reinforcing The Ultimium Remedium Principle In Environmental Law Enforcement: A Three-Layered Approach Under Law No. 32 Of 2009*. Jurnal Hukum UNISSULA, 41(2) : 1448-1465.
- Zakariya, R. (2021). *Optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan melalui putusan hakim yang berkepastian*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1) : 117-139.
DOI : <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9897>

D. HASIL PENELITIAN

- Indriana. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memproduksi Konten Pornografi Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skg)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Kusnaini. (2024). *Analisis Yuridis Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Terhadap Tindak Pidana Memiliki Menyimpan atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam Konsep Kepastian Hukum*. Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
- M Yusril Mahendra Butar Butar. (2021). *Kajian Hukum Pencemaran Danau Siomak atas Dampak Pembuangan Bangkai Babi yang Terkena Virus Hog Cholera Ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi di Lingkungan Hidup Kota Medan)*. Skripsi. Program Studi Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Medan Area. Medan.
- Raihan Dhia Sarlin. (2024) *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Eksibisionisme (Studi Putusan 865K/Pid.Sus/2013)*. Skripsi. Program Studi Hukum Pidana. Fakultas Hukum. Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

E. LAIN-LAIN

Putusan Nomor 464/Pid.B/LH/2022/PN Mtr

- Hukum Online. (2026). *Tak Ada Pidana Tanpa Kesalahan, KUHP Nasional Tegaskan Prinsip Mens Rea*. Diakses 24 Mei 2026 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-ada-pidana-tanpa-kesalahan--kuhp-nasional-tegaskan-prinsip-mens-rea-lt6964d83399a70/>.
- Hukum Online. (2025). *Pergeseran Konsep Kesalahan dalam KUHP Nasional*. Diakses 23 Mei 2026 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pergeseran-konsep-kesalahan-dalam-kuhp-nasional-lt688c6b4fd700e/?page=1>.
- Hukum Online. (2024). *Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia*. Diakses pada 21 Juni 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>

- Hukum Online. (2024). Apa Perbedaan Delik Formil dan Delik Materil?. Diakses 21 Juni 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b/>
- JDIH Maritim. (2025). Dumping (pembuangan) limbah ke laut. Diakses 11 November 2025, dari <https://jdih.maritim.go.id/dumping-pembuangan-limbah-ke-laut->
- KBBI Daring. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Diakses 11 November 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. *Overmacht (Daya Paksa) dalam Hukum Pidana*. (2021). Diakses tanggal 28 Mei 2025. dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/konsep-overmacht-daya-paksa-dalam-hukum-pidana/>
- Mangatur Nainggolan Law Firm. (2025). *Sistem Dan Beban Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Tonggak Penegakan Hukum Pidana*. Diakses pada tanggal 12 Juni 2016. <https://mnllaw.co.id/sistem-dan-beban-pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana-sebagai-tonggak-penegakan-hukum-pidana/>
- Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. (2023). *Ratio Desidendi Dari Seorang Hakim*. Diakses pada 28 Mei 2026, dari <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html>